

Strategi Adaptif-Humanis Kontingen Garuda XXXIX-A MONUSCO dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Republik Demokratik Kongo

Riri Setiawan¹ Haryo Mustoko² Jimmy Veni Tokio Tiwow³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: riri110932@gmail.com¹ haryosyifa69@gmail.com² jtiwow3@gmail.com³

Abstrak

Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu wilayah konflik paling kompleks di dunia, dengan lebih dari 120 kelompok bersenjata dan jutaan pengungsi internal. Pascaserangan terhadap penjaga perdamaian di Semuliki pada 2017, Indonesia ditunjuk sebagai kontingen pengganti melalui Batalyon Gerak Cepat XXXIX-A MONUSCO di Provinsi Tanganyika. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran, tantangan, dan strategi Kontingen Garuda dalam pemeliharaan perdamaian di Kalemie. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui wawancara terhadap lima informan kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, dianalisis menggunakan model interaktif Miles-Huberman-Saldana serta divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan Kontingen Garuda menjalankan peran multidimensional sebagai fasilitator perdamaian humanis, menghadapi tantangan multidimensi, dan menerapkan strategi adaptif-humanis. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan model strategi adaptif-humanis khas Indonesia melalui prinsip "5S" dan mekanisme after-action review yang menjadikan strategi efektif sekaligus berkelanjutan.

Kata Kunci: Kontingen Garuda, MONUSCO, Pemeliharaan Perdamaian, Strategi Adaptif-Humanis, Republik Demokratik Kongo

Abstract

The Democratic Republic of the Congo is one of the world's most complex conflict zones, with more than 120 armed groups and millions of internally displaced persons. Following the attack on peacekeepers in Semuliki in 2017, Indonesia was designated as the replacement contingent through the Rapid Deployment Battalion XXXIX-A MONUSCO in Tanganyika Province. This study analyses the roles, challenges, and strategy of the Garuda Contingent in peacekeeping in Kalemie. It employs a descriptive qualitative case-study approach through interviews with five key informants, participatory observation, and documentation study, analysed using the Miles-Huberman-Saldana interactive model and validated through triangulation. The findings show that the Garuda Contingent performed multidimensional roles as a humanist peace facilitator, faced multidimensional challenges, and implemented an adaptive-humanist strategy. The novelty lies in formulating a distinctively Indonesian adaptive-humanist strategy model through the "5S" principle and after-action review mechanism that render the strategy both effective and sustainable.

Keywords: Garuda Contingent, MONUSCO, Peacekeeping, Adaptive-Humanist Strategy, Democratic Republic of the Congo



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan salah satu wilayah konflik paling kompleks dan berkepanjangan di dunia. Situasi konflik di negara ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kolonialisme Eropa yang memicu ketimpangan dan eksploitasi sistematis. Melalui Konferensi Berlin tahun 1884, Belgia secara resmi menguasai Kongo dan memulai era kolonial yang ditandai eksploitasi besar-besaran, kerja paksa, serta perbudakan yang menyengsarakan masyarakat lokal (TNI, 2019). Warisan kolonial tersebut tidak hanya meninggalkan luka sejarah, tetapi juga menjadi pemicu utama konflik internal

pascakemerdekaan berupa pemberontakan, perang saudara, serta kehadiran kelompok-kelompok bersenjata, terutama di kawasan timur, yang menciptakan instabilitas berkepanjangan dan mengguncang keamanan regional Afrika Tengah. Kompleksitas konflik ini tercermin dari kenyataan bahwa hingga kini terdapat lebih dari 100 kelompok bersenjata yang menguasai sejumlah wilayah di RDK. Situasi tersebut diperburuk oleh konflik politik internal, lemahnya sistem pemerintahan, terbengkalainya pembangunan infrastruktur, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini mendorong sekitar 4,5 juta orang mengungsi ke luar negeri, sementara 13,1 juta penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan dengan penambahan 5,6 juta jiwa sejak tahun 2017 (Savero et al., 2024). Kompleksitas semacam ini menempatkan RDK sebagai salah satu medan operasi pemeliharaan perdamaian tersulit yang pernah ditangani Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Titik balik keterlibatan Indonesia bermula dari serangan terhadap markas penjaga perdamaian PBB di Kota Semuliki pada 7 Desember 2017 yang menewaskan 14 personel dan melukai lebih dari 53 lainnya. Insiden yang dipicu kasus pelecehan oleh oknum pasukan sebelumnya ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan PBB, sehingga PBB menunjuk Indonesia sebagai pasukan pengganti di Provinsi Tanganyika melalui Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat TNI XXXIX-A MONUSCO yang berkekuatan 850 personel dari tiga matra. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sipil terhadap pasukan PBB, Indonesia dituntut cepat masuk di tengah masyarakat melalui berbagai pendekatan sosial-budaya, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan lainnya. Beratnya medan operasi tercermin dari data intelijen yang mencatat keberadaan enam kelompok bersenjata utama di wilayah Provinsi Tanganyika dengan ibu kota Kalemie seluas 134.940 km². Kelompok-kelompok tersebut, antara lain Apa Na Pale, Yakutumba, Fimbo Na Fimbo, Perci, dan Kabeke, memiliki total kombatan mencapai ribuan orang dengan motif yang beragam mulai dari perlawanan terhadap Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), konflik antarsuku, hingga penguasaan hasil tambang dan kepentingan ekonomi (TNI, 2019). Kompleksitas aktor bersenjata inilah yang menuntut mandat MONUSCO untuk menjalankan tanggung jawab perlindungan masyarakat sipil sekaligus operasi militer terbatas melalui Force Intervention Brigade ketika warga sipil berada dalam ancaman langsung.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kontingen Garuda pada Batalyon Gerak Cepat menerapkan strategi yang adaptif dan kontekstual, tidak kaku, serta menyesuaikan diri dengan bentuk ancaman, kondisi sosial-budaya, politik, dan geografis di lapangan. Strategi ini memadukan pendekatan militer terbatas dengan pendekatan sipil yang humanis, komunikasi intensif, serta respons cepat terhadap perubahan situasi dengan fokus pada hasil positif (Nasution et al., 2024). Keseimbangan antara ketegasan militer dan pendekatan kemanusiaan inilah yang menjadi karakter khas pelaksanaan mandat MONUSCO oleh kontingen Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan misi juga bergantung pada dukungan logistik yang memadai, pemanfaatan teknologi dalam operasi, serta kolaborasi internasional yang erat, yang sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung stabilitas jangka panjang di wilayah konflik. Meskipun keberadaan Pasukan Garuda dan strategi yang dijalankan telah mendukung misi perdamaian, penelitian mengenai efektivitas strategi adaptif dan kontekstual dalam menghadapi tantangan multidimensi di lapangan serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat sipil masih sangat terbatas. Kondisi inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam keterpaduan peran, tantangan, dan strategi Pasukan Garuda XXXIX-A MONUSCO. Pemahaman yang komprehensif atas ketiga aspek tersebut penting bukan hanya untuk mendokumentasikan praktik terbaik institusional, tetapi juga untuk memperkaya kerangka teoretis mengenai operasi pemeliharaan perdamaian yang dijalankan oleh negara berkembang.

Sejumlah kajian terdahulu telah menyoroti keterlibatan Indonesia dan MONUSCO di RDK. Tanjung (2020) menelusuri jejak historis Kontingen Garuda II pada 1960-1961 yang mencerminkan semangat antikolonialisme dan politik luar negeri bebas aktif. Sriyanto (2022) secara kritis menilai kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman multidimensi dan merekomendasikan adopsi United Nations Peacekeeping Capability Readiness System (UNPCRS). Bundu (2023) menegaskan keberhasilan MONUSCO dalam misi keamanan dan evakuasi sipil sangat bergantung pada kerja sama lintas pihak, sementara Priastanto et al. (2024) membuktikan kontribusi keahlian teknik Kompi Zeni bagi pembangunan infrastruktur di Provinsi Beni. Savero et al. (2024) menyoroti efektivitas pendekatan non-kekerasan dalam program Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) MONUSCO, dan Pasha dan Yustitiningtyas (2024) mengungkap hambatan koordinasi antarlembaga dalam perlindungan hak anak di RDK. Berdasarkan pemetaan tersebut, terlihat kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan kondisi aktual (*das sein*). Secara ideal, misi pemeliharaan perdamaian seharusnya mampu menjamin keamanan warga sipil dan memulihkan kepercayaan masyarakat; namun secara aktual, keterbatasan mandat, kendala geografis, dan kompleksitas ancaman kerap membuat efektivitas misi belum optimal, sebagaimana tampak pada periode sebelum penugasan kontingen Indonesia yang bahkan diwarnai serangan mematikan terhadap penjaga perdamaian. Kesenjangan inilah yang menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana kontingen Indonesia mengelola tantangan multidimensi melalui strategi yang khas, sehingga mampu membalikkan situasi ketidakpercayaan masyarakat menjadi penerimaan dan stabilisasi wilayah.

Dari sisi kesenjangan penelitian (*research gap*), kajian terdahulu cenderung menyoroti MONUSCO secara kelembagaan, aspek kapabilitas teknis, atau program tematik seperti DDR, tetapi belum secara komprehensif menganalisis keterpaduan antara peran, tantangan, dan strategi Kontingen Garuda XXXIX-A di Provinsi Tanganyika dalam satu kerangka analisis yang utuh. Secara praktis, pengalaman lapangan kontingen belum terdokumentasi sistematis sebagai praktik terbaik institusional bagi penyiapan misi berikutnya. Secara teoretis, penerapan terpadu teori keamanan multidimensi dan teori strategi *means-ways-ends* untuk menjelaskan pendekatan sipil-militer kontingen negara berkembang masih terbatas. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah untuk memiliki basis pengetahuan strategis yang teruji dalam menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian yang semakin dituntut adaptif menghadapi konflik multidimensi. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah perumusan model strategi adaptif-humanis khas Indonesia melalui prinsip "5S" (*sapa, senyum, salam, sopan, santun*) dan mekanisme *after-action review*, yang belum dirumuskan secara eksplisit dalam penelitian sebelumnya dan menjadi kontribusi orisinal bagi pengembangan studi strategi pertahanan sekaligus praktik pemeliharaan perdamaian PBB. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran, tantangan, dan strategi Kontingen Garuda XXXIX-A MONUSCO dalam pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo.

Kajian Konseptual

Analisis penelitian ini berpijak pada tiga landasan konseptual utama. Pertama, teori keamanan multidimensi Buzan (1991) yang memandang keamanan sebagai kondisi terbebasnya suatu entitas dari segala bentuk ancaman terhadap apa yang dimilikinya serta tidak merasakan ketakutan akan kemungkinan serangan dari pihak lain. Buzan menguraikan keamanan dalam beberapa tingkatan, mulai dari level individu, negara, hingga internasional, serta mengidentifikasi lima dimensi utama analisis keamanan, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Buzan et al., 1998). Konsep ini diperluas oleh United Nations

Development Programme (1994) melalui pendekatan human security yang mencakup tujuh dimensi, meliputi keamanan ekonomi, pribadi, kesehatan, lingkungan, komunitas, pangan, dan politik. Dalam konteks MONUSCO, kerangka ini memungkinkan penilaian keamanan tidak sekadar dari stabilitas militer, tetapi juga dari perlindungan menyeluruh terhadap kesejahteraan masyarakat sipil di wilayah konflik. Kedua, teori strategi means-ways-ends Lykke (1989) yang memandang strategi sebagai keterpaduan antara sumber daya atau sarana (means), metode atau cara (ways), dan tujuan akhir atau sasaran (ends). Kerangka ini melengkapi pandangan Glueck dalam Amirullah (2015) bahwa strategi merupakan rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan lingkungan. Dalam konteks pertahanan, strategi tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga melibatkan seluruh elemen kekuatan nasional termasuk unsur politik, sebagaimana ditegaskan dalam Buku Putih Pertahanan (Chaer et al., 2021). Kerangka ini menjadi pisau analisis utama untuk memetakan bagaimana perencanaan dan pelaksanaan tugas Kontingen Garuda dirancang dalam mendukung tujuan strategis misi. Ketiga, konsep peacekeeping PBB (Hutabarat, 2018) yang dipahami sebagai metode untuk memantau dan menyelesaikan konflik bersenjata melalui pengerahan personel militer, kepolisian, dan sipil. Konsep ini berlandaskan lima prinsip operasional, yaitu berada di bawah mandat PBB, adanya persetujuan pihak yang berkonflik (consent), bersifat tidak memihak (impartial), melibatkan kontribusi negara anggota, serta penggunaan kekuatan secara minimal (use of force) yang hanya dibenarkan untuk membela diri. Konsep ini dilengkapi pemahaman mengenai peran negara dan organisasi internasional dalam misi perdamaian, yang berfungsi sebagai forum kerja sama, media rekonsiliasi, serta lembaga independen pelaksana kegiatan kemanusiaan (Sd & Toy, 2018). Ketiga landasan ini disintesis untuk menjelaskan bagaimana kontingen negara berkembang menerjemahkan mandat perlindungan sipil ke dalam praktik lapangan yang adaptif dan humanis.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Untuk mempertajam kontribusi penelitian, sejumlah kajian terdahulu yang relevan dipetakan sebagai pembanding sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Pemetaan ini menunjukkan bahwa meskipun tema pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo telah banyak dikaji, belum terdapat penelitian yang secara terpadu menganalisis peran, tantangan, dan strategi Kontingen Garuda XXXIX-A di Provinsi Tanganyika dalam satu kerangka analisis yang utuh dengan merumuskan model strategi yang eksplisit.

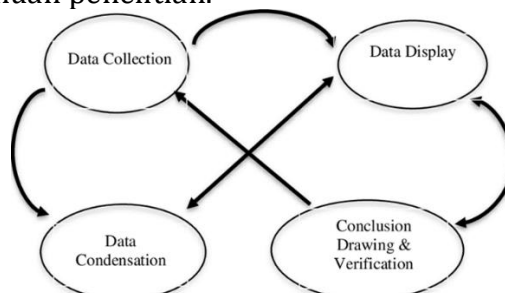
Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Tanjung (2020)	Peranan historis Kontingen Garuda II di Republik Kongo (1960-1961)	Penelitian ini berfokus pada Kontingen XXXIX-A kontemporer dengan analisis strategi means-ways-ends
2	Sriyanto (2022)	Kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia di RDK	Penelitian ini menekankan perumusan model strategi adaptif-humanis, bukan sekadar kapabilitas
3	Bundu (2023)	Kiprah kelembagaan MONUSCO 2020-2021	Penelitian ini menyoroti praktik lapangan kontingen Indonesia secara spesifik
4	Priastanto et al. (2024)	Operasi Kompi Zeni di Provinsi Beni	Penelitian ini mengkaji keterpaduan peran, tantangan, dan strategi di Provinsi Tanganyika
5	Savero et al. (2024)	Implementasi program DDR III MONUSCO 2015-2018	Penelitian ini merumuskan model strategi terpadu, bukan program tematik tunggal

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam peran, tantangan, dan strategi Kontingen Garuda XXXIX-A MONUSCO. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti, situasi lapangan, serta perilaku dan pandangan para pelaku (Moleong, 2021). Penelitian dilaksanakan di Jakarta sebagai lokasi wawancara, dengan fokus kajian pada masa penugasan kontingen di Kalemie, Provinsi Tanganyika, Republik Demokratik Kongo, dan berlangsung sejak Juni 2025 hingga Juni 2026. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan penguasaan informasi terhadap pelaksanaan misi. Lima informan kunci ditetapkan, yaitu Kepala Seksi Personel, Perwira Seksi Rencana Operasi, Perwira Penerangan, Dokter Satgas, serta Komandan Peleton Kompi A, seluruhnya dari Satgas TNI Konga XXXIX-A/MONUSCO. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur secara tatap muka maupun daring yang direkam dan ditranskripsikan, sedangkan data sekunder dihimpun dari dokumen resmi, laporan purna tugas, catatan observasi partisipatif selama penugasan tahun 2018, serta kajian literatur akademik yang relevan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara antarinforman, data sekunder, dan temuan literatur. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang mencakup empat tahapan yang saling terkait, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1. Data mengenai peran, tantangan, dan strategi direduksi dan dikategorikan berdasarkan isu utama, kemudian dianalisis menggunakan teori keamanan multidimensi Buzan, teori strategi means-ways-ends Lykke, dan konsep peacekeeping sebagai pisau analisis. Teknik pengumpulan data dijabarkan sebagai berikut. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh informasi mendalam dari para pelaku, dilaksanakan secara semiterstruktur dan terbuka baik tatap muka maupun daring. Observasi dilakukan secara partisipatif non-struktural, di mana peneliti turut terlibat dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan penugasan selama misi tahun 2018 sambil mencatat dinamika sosial, interaksi masyarakat, dan respons terhadap situasi keamanan setempat. Studi dokumen memanfaatkan dokumen publik seperti jurnal, buku, artikel, dan majalah berita, serta dokumen privat berupa laporan resmi dan arsip lembaga terkait. Pemanfaatan tiga teknik ini secara simultan memungkinkan triangulasi metode yang memperkuat keabsahan temuan penelitian.



Gambar 1. Komponen Model Interaktif Analisis Data

Sumber: Miles, Huberman, & Saldaña (2020)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan yang disusun berdasarkan tiga fokus penelitian, yaitu peran, tantangan, dan strategi Kontingen Garuda. Data hasil wawancara terhadap lima informan kunci disajikan secara terpadu, kemudian dianalisis dengan membandingkannya terhadap temuan penelitian terdahulu dan kerangka teori yang digunakan.

Gambaran Umum Kontingen Garuda XXXIX-A MONUSCO

Pasukan Garuda yang tergabung dalam Satgas Batalyon Gerak Cepat TNI XXXIX-A pada misi MONUSCO di Kalemie, Provinsi Tanganyika, merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Sebagai Rapid Deployable Battalion (RDB), satuan ini memiliki mobilitas tinggi dan kesiapsiagaan operasional untuk merespons cepat potensi gangguan keamanan. Struktur organisasinya terdiri atas unsur tempur dan unsur pendukung, termasuk Kompi Zeni (KIZI) yang berperan dalam pembangunan serta perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum sebagai bagian dari stabilisasi wilayah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pasukan Garuda menjalankan patroli rutin, pengamanan wilayah rawan, pengawalan distribusi bantuan kemanusiaan, serta pengamanan kamp pengungsi. Selain fungsi pengamanan, satuan ini melaksanakan kegiatan Civil-Military Coordination (CIMIC) melalui interaksi sosial, dukungan kemanusiaan, dan kerja sama dengan pemerintah serta masyarakat setempat. Sebagai ilustrasi konkret, pelaksanaan Operasi Wibawa bersama staf PBB di Kalemie menampilkan integrasi antara operasi keamanan dan pendekatan persuasif yang menghasilkan penyerahan sejumlah senjata dari kelompok bersenjata, disertai pelayanan kesehatan dan pendampingan sosial, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.

Operasi Wibawa tersebut menunjukkan bahwa Pasukan Garuda tidak hanya menjalankan patroli bersenjata, tetapi juga terlibat aktif dalam operasi gabungan, kegiatan sosial, serta upaya stabilisasi berbasis komunitas. Pendekatan semacam ini mencerminkan pelaksanaan tugas yang tidak semata berorientasi pada aspek militer, melainkan mengedepankan dimensi humanis dan pembangunan sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian secara berkelanjutan. Karakter inilah yang menjadi benang merah seluruh temuan penelitian dan akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan tiga fokus penelitian berikut. Struktur organisasi kontingen yang terdiri atas unsur tempur dan unsur pendukung, termasuk Kompi Zeni yang menangani pembangunan infrastruktur, memungkinkan pelaksanaan tugas secara multidimensi dalam satu satuan yang terpadu. Dengan kekuatan 850 personel dari tiga matra, kontingen memiliki kapasitas untuk menjalankan patroli keamanan, pengamanan kamp pengungsi, pengawalan bantuan kemanusiaan, sekaligus program pemberdayaan masyarakat secara simultan. Kombinasi kapabilitas ini menjadi modal penting bagi kontingen dalam merespons kompleksitas tantangan di lapangan, sebagaimana akan diuraikan pada pembahasan mengenai peran, tantangan, dan strategi berikut ini.



Gambar 2. Pasukan Garuda Konga XXXIX-A RDB dan UN Staff Menggelar Operasi Wibawa di Kalemie
Sumber: Inilah Online (2019)

Peran Kontingen Garuda XXXIX-A MONUSCO dalam Misi Perdamaian

Hasil wawancara terhadap lima informan kunci menunjukkan bahwa peran Kontingen Garuda dalam misi MONUSCO di Kalemie melampaui fungsi militer konvensional dan mencakup empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu stabilisasi keamanan, pembangunan

infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektoral. Mandat utama kontingen adalah menjaga perdamaian dan melindungi warga sipil melalui patroli rutin, pengamanan kamp pengungsi, dan tindakan quick reaction sesuai Rules of Engagement (ROE). Dampak kehadiran pasukan dirasakan konkret berupa peningkatan rasa aman masyarakat, bahkan wilayah Kalemie berangsur dinilai cukup aman sehingga pasukan PBB dapat direlokasi ke wilayah konflik lain yang lebih membutuhkan. Kesamaan pandangan antarinforman memperkuat validitas temuan ini. Salah seorang informan menegaskan bahwa Kontingen Garuda merupakan pasukan perdamaian Indonesia di bawah misi MONUSCO yang tugas utamanya meliputi perlindungan warga sipil, menjaga stabilitas wilayah, mendukung proses perdamaian, serta melaksanakan operasi militer non-tempur dan kegiatan CIMIC. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan melalui patroli rutin, pengamanan kamp pengungsi, quick reaction sesuai ROE, serta penjagaan gencatan senjata, yang secara berangsur berhasil menciptakan kondisi keamanan yang memungkinkan relokasi pasukan PBB ke wilayah lain yang masih berkonflik.



Gambar 3. Pasukan Garuda Konga XXXIX-A RDB Membantu Aktivitas Masyarakat di Kalemie, Provinsi Tanganyika

Sumber: UN Peacekeeping (2019)

Selain fungsi pengamanan, unsur RDB dan KIZI berperan dalam perbaikan jalan dan jembatan, sementara program civic mission dan CIMIC mencakup pelatihan dasar keamanan, edukasi kesehatan, serta pengelolaan bahan pangan agar bernilai guna lebih tinggi. Bentuk konkret pemberdayaan masyarakat ini tampak pada kegiatan membantu aktivitas warga sehari-hari sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3, serta kegiatan penyuluhan kesehatan kepada siswa sekolah pada Gambar 4. Pendekatan persuasif yang khas juga berhasil mengumpulkan senjata secara sukarela, mendamaikan suku yang berkonflik, dan mereintegrasikan mantan kombatan tanpa cara koersif. Peran fasilitator ini diperkuat oleh koordinasi formal dengan Gubernur Tanganyika, Wali Kota Kalemie, serta kepolisian setempat.



Gambar 4. Pasukan Garuda Memberikan Penyuluhan Kesehatan kepada Siswa Sekolah di Kalemie, Provinsi Tanganyika

Sumber: Dokumentasi Satgas TNI Konga XXXIX-A/MONUSCO (2018)

Program civic mission dan CIMIC yang dijalankan kontingen tidak berhenti pada bantuan fisik semata, tetapi diarahkan pada penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Melalui program ini, personel mengajarkan cara mengelola bahan makanan pokok agar bernilai guna lebih tinggi, memberikan pelatihan dasar keamanan, serta menyelenggarakan edukasi kesehatan bagi warga dan pelajar. Pendekatan pemberdayaan semacam ini menjadi instrumen strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meletakkan fondasi pemulihan yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, peran Kontingen Garuda mencerminkan pergeseran paradigma peacekeeping dari sekadar menjaga gencatan senjata menuju pembangunan perdamaian yang berkelanjutan (peacebuilding) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan objek pasif dari misi. Dalam membangun kerja sama lintas sektoral, koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan lokal, serta komponen sipil MONUSCO menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas. Para informan menjelaskan bahwa kontingen menjalankan kunjungan resmi kepada gubernur dan wali kota, patroli bersama instansi militer dan kepolisian setempat, serta menyelenggarakan forum koordinasi rutin. Dalam kerangka ini, Kontingen Garuda berperan sebagai fasilitator yang menjembatani militer, sipil, dan pemerintah lokal, sehingga pendekatan kolaboratif menjadi strategi utama untuk memastikan keberlanjutan stabilitas wilayah. Penyesuaian peran militer dengan kebutuhan sosial masyarakat juga menjadi prinsip yang konsisten, di mana peran militer sengaja tidak ditonjolkan dan perlindungan warga sipil serta kebutuhan sosial masyarakat diprioritaskan.

Tabel 2. Peran Kontingen Garuda XXXIX-A MONUSCO dan Interpretasi Teoretis

No	Aspek Peran	Temuan Lapangan	Interpretasi Teoretis
1	Keamanan dan stabilisasi wilayah	Patroli rutin, pengamanan kamp pengungsi, dan quick reaction sesuai ROE hingga Kalemie dinilai aman dan pasukan PBB dapat direlokasi	Wujud fungsi PBB sebagai lembaga independen pelaksana peacekeeping operation (Agung et al., 2005; Perwita & Yani, 2017) dan sistem keamanan kolektif (Monica & Suarnata, 2023)
2	Perlindungan warga sipil	Peningkatan signifikan rasa aman melalui pendekatan humanis tanpa menonjolkan persenjataan	Perlindungan sipil sebagai bagian integral mandat kemanusiaan PBB yang inklusif dan non-intimidatif
3	Rekonsiliasi dan pendekatan persuasif	Pengumpulan senjata sukarela, perdamaian antarsuku, dan reintegrasi kombatan tanpa koersi	Fungsi rekonsiliasi organisasi internasional (Cheever & Havilland dalam Sd & Toy, 2018); pendekatan non-koersif efektif dalam konflik komunal
4	Pembangunan infrastruktur dan kapasitas lokal	Unsur RDB dan KIZI memperbaiki jalan dan jembatan; program civic mission dan CIMIC	Comprehensive approach yang memperluas makna peacekeeping menuju pemulihan sosial-ekonomi berkelanjutan
5	Koordinasi lintas sektoral	Koordinasi formal dengan pemerintah daerah dan kepolisian; kontingen sebagai fasilitator	Implementasi multilateralisme PBB yang memperkuat legitimasi dan keberlanjutan misi

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa peran Kontingen Garuda merupakan implementasi nyata dari seluruh fungsi organisasi internasional sebagaimana dirumuskan para ahli, yakni sebagai forum pencegahan konflik, media rekonsiliasi, dan lembaga independen kemanusiaan. Keberhasilan menstabilkan Kalemie sehingga memungkinkan relokasi pasukan PBB selaras dengan temuan Bundu (2023) bahwa perlindungan sipil merupakan elemen inti setiap operasi peacekeeping, serta dengan Nasution et al. (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan misi menuntut pendekatan strategis dan operasional terpadu. Keberhasilan tersebut sekaligus menjawab kritik Sriyanto (2022) mengenai kesiapan kapabilitas, dengan membuktikan bahwa kapabilitas yang memadai mampu menghasilkan dampak terukur.

Keunikan pendekatan Kontingen Garuda terletak pada integrasi koheren antara fungsi militer dan fungsi sipil-kemanusiaan yang dipandu prinsip humanis dan persuasif. Keberhasilan pengumpulan senjata sukarela dan rekonsiliasi antarsuku merupakan manifestasi pendekatan DDR berbasis persuasi yang diidentifikasi Savero et al. (2024), sementara kontribusi RDB dan KIZI menegaskan temuan Priastanto et al. (2024) tentang peran keahlian teknik dalam pembangunan kembali infrastruktur. Kesenambungan tradisi humanis ini bahkan dapat ditelusuri hingga Kontingen Garuda II pada 1960-1961 (Tanjung, 2020), memperlihatkan konsistensi Indonesia dalam mengedepankan dialog dan rekonsiliasi sebagai ciri politik luar negeri bebas aktif. Dengan demikian, peran Kontingen Garuda mengonfirmasi argumen Rudy (1998) bahwa organisasi internasional dan agennya di lapangan berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pengendali konflik, tetapi juga sebagai katalis perubahan sosial yang berkelanjutan. Lebih jauh, dimensi koordinasi lintas sektoral yang dijalankan Kontingen Garuda memperlihatkan kematangan institusional dalam memahami logika multilateralisme PBB. Kunjungan resmi kepada Gubernur Tanganyika dan Wali Kota Kalemie, patroli bersama kepolisian setempat, serta forum koordinasi rutin dengan komponen sipil MONUSCO menempatkan kontingen sebagai fasilitator yang menjembatani militer, sipil, dan pemerintah lokal. Temuan Sanjoko (2025) mengenai signifikansi faktor birokrasi dan kelembagaan terhadap efektivitas misi mengonfirmasi pentingnya pendekatan kelembagaan yang terstruktur ini. Peran fasilitator tersebut memperkuat legitimasi misi sekaligus memastikan keberlanjutan perdamaian pascapenugasan, karena kapasitas lokal telah dibangun secara partisipatif dan tidak menciptakan ketergantungan pada kehadiran pasukan asing.

Secara keseluruhan, peran Kontingen Garuda dalam misi MONUSCO di Kalemie merupakan implementasi nyata dari seluruh fungsi organisasi internasional secara simultan dan sinergis, bukan dijalankan secara parsial atau terpisah. Ketiga fungsi utama, yaitu sebagai forum pencegahan konflik, media rekonsiliasi, dan lembaga independen kemanusiaan, termanifestasi secara koheren dalam praktik lapangan. Keunikan pendekatan kontingen terletak pada integrasi yang koheren antara fungsi militer dan fungsi sipil-kemanusiaan yang dipandu prinsip humanis dan persuasif, sebuah karakter yang terbukti efektif dalam konteks konflik multidimensi di Afrika Tengah dan menegaskan kapasitas serta komitmen Indonesia sebagai salah satu kontributor utama misi perdamaian PBB. Kesenambungan pendekatan humanis ini memiliki akar historis yang panjang dalam tradisi pemeliharaan perdamaian Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan Tanjung (2020), Kontingen Garuda II yang bertugas di Republik Kongo pada 1960-1961 telah mengedepankan pendekatan yang melampaui fungsi militer konvensional dalam mengatasi pemberontakan dan konflik di berbagai wilayah. Konsistensi karakter ini melintasi lebih dari enam dekade membuktikan bahwa pendekatan adaptif-humanis bukanlah fenomena insidental, melainkan cerminan dari nilai-nilai yang melekat pada politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa Indonesia memiliki identitas khas sebagai penyumbang pasukan perdamaian yang mengutamakan dialog, rekonsiliasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai jalan menuju stabilitas yang berkelanjutan.

Analisis atas keempat dimensi peran tersebut secara keseluruhan mengonfirmasi bahwa keberhasilan Kontingen Garuda bersumber dari kemampuannya menempatkan perlindungan warga sipil sebagai orientasi utama, bukan sekadar sebagai konsekuensi dari operasi militer. Pergeseran fokus dari pendekatan yang berpusat pada kekuatan menuju pendekatan yang berpusat pada masyarakat inilah yang menjadikan misi di Kalemie relatif berhasil dibandingkan periode-periode sebelumnya yang diwarnai ketidakpercayaan masyarakat. Temuan ini memberikan pelajaran penting bahwa legitimasi sebuah misi perdamaian pada akhirnya ditentukan oleh persepsi dan penerimaan masyarakat yang dilindungi, bukan semata

oleh kapasitas militer yang dikerahkan, sehingga membangun kepercayaan menjadi investasi strategis yang menentukan keberhasilan jangka panjang.

Tantangan yang Dihadapi Kontingen Garuda XXXIX-A MONUSCO

Hasil wawancara terhadap lima informan kunci menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Kontingen Garuda selama penugasan di Kalemie bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Meskipun terdapat variasi penekanan antarinforman sesuai posisi dan pengalaman masing-masing, secara umum terdapat irisan pandangan yang menunjukkan kompleksitas lingkungan operasi misi perdamaian. Tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima dimensi utama, yaitu keamanan, geografis dan infrastruktur, sosial-budaya, regulasi, serta tekanan psikologis personel, yang keseluruhannya menuntut kapabilitas adaptif dari setiap unsur kontingen. Dalam aspek keamanan, situasi di Kalemie tetap fluktuatif akibat keberadaan kelompok bersenjata dan milisi ilegal yang mengancam melalui penyergapan dan penembakan sporadis, meski masih dapat dikelola dengan dukungan unsur PBB lainnya. Kondisi geografis berupa hutan lebat, wilayah terpencil, medan berbukit, serta infrastruktur terbatas—terutama saat musim hujan—menghambat mobilitas pasukan dan distribusi logistik, sebagaimana tergambar pada Gambar 5.



Gambar 5. Kendala Mobilitas Pasukan Garuda Konga XXXIX-A RDB pada Medan Berlumpur di Kalemie, Provinsi Tanganyika

Sumber: Dokumentasi Satgas TNI Konga XXXIX-A/MONUSCO (2018)

Gambar 5 memperlihatkan secara konkret bagaimana medan berlumpur pada musim hujan menghambat pergerakan kendaraan taktis dan ambulans kontingen. Luasnya wilayah operasi yang mencapai ratusan ribu kilometer persegi, dipadukan dengan jarak antarkomunitas yang jauh dan infrastruktur jalan yang belum memadai, memperlambat waktu respons keamanan serta distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan. Kondisi ini menempatkan aspek geografis bukan sekadar sebagai kendala teknis, melainkan sebagai faktor yang berdampak langsung pada efektivitas perlindungan warga sipil, mengingat keterlambatan respons dapat memperlemah kemampuan pasukan menjangkau komunitas yang berada dalam ancaman. Oleh karena itu, kesiapan logistik dan mobilitas menjadi prasyarat operasional yang tidak dapat diabaikan dalam setiap perencanaan misi. Terdapat variasi penekanan antarinforman yang memperkaya pemahaman atas kompleksitas tantangan ini. Sebagian informan menilai ancaman keamanan sebagai kendala paling menonjol yang menuntut respons cepat dengan sumber daya terbatas, sementara informan lain menekankan bahwa dengan dukungan unsur-unsur PBB serta Pre-Deployment Training (PDT) yang komprehensif, sebagian besar tantangan tersebut relatif dapat dikelola. Perbedaan penekanan ini justru menegaskan bahwa persepsi terhadap tingkat kesulitan sangat dipengaruhi oleh posisi dan pengalaman masing-masing personel, sekaligus menunjukkan bahwa kesiapan pra-penugasan berperan penting dalam memoderasi dampak tantangan di lapangan. Hambatan bahasa

Swahili, misalnya, diatasi melalui pembelajaran bahasa secara timbal balik yang pada akhirnya memperkuat kedekatan dengan masyarakat lokal.

Tabel 3. Tantangan Multidimensi Kontingen Garuda dan Analisis Teoretis

No	Dimensi Tantangan	Temuan Lapangan	Analisis Teoretis
1	Keamanan: ancaman kelompok bersenjata	Kondisi fluktuatif akibat milisi ilegal, ancaman ambush dan penembakan sporadis	Situasi ketidakamanan dan dimensi militer dalam kerangka Buzan (1991; 1998); berbenturan dengan prinsip use of force minimal
2	Geografis dan infrastruktur	Hutan lebat, wilayah terpencil, dan infrastruktur terbatas menghambat mobilitas dan logistik	Dimensi keamanan lingkungan Buzan; berimplikasi pada keamanan komunitas dan pangan (UNDP dalam Gulo et al., 2024)
3	Sosial-budaya dan bahasa	Konflik komunal antarsuku dan hambatan bahasa Swahili, namun penerimaan masyarakat baik	Dimensi keamanan komunitas dan interaksi lintas batas (Setyowati et al., 2018); nilai kemanusiaan universal melampaui perbedaan
4	Regulasi: batasan ROE	Penggunaan kekuatan minimum yang membatasi fleksibilitas taktis	Prinsip kelima peacekeeping PBB (Hutabarat, 2018); kepatuhan memperkuat legitimasi misi
5	Psikologis: tekanan mental personel	Risiko kelelahan dan dilema moral, diminimalisir melalui seleksi dan kepemimpinan	Keamanan individu dan human security (UNDP); kesejahteraan personel sebagai prasyarat keberhasilan

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Kompleksitas tantangan tersebut menegaskan perspektif Buzan et al. (1998) bahwa keamanan bersifat multidimensi dan tidak dapat dibatasi pada aspek militer semata. Ancaman kelompok bersenjata yang menuntut respons cepat namun terkendala prinsip use of force minimal menciptakan dilema operasional nyata, sejalan dengan catatan Bundu (2023) dan Sriyanto (2022) mengenai kendala lapangan dan kesiapan kapabilitas. Kendala geografis tidak sekadar bersifat teknis-militer, melainkan berimplikasi pada keamanan lingkungan, komunitas, dan pangan masyarakat sipil, sebagaimana hambatan aksesibilitas yang juga diidentifikasi Savero et al. (2024) dalam pelaksanaan DDR. Hambatan sosial-budaya memperlihatkan bahwa keberhasilan misi menuntut kompetensi komunikasi lintas budaya, bukan sekadar kekuatan militer. Penerimaan positif masyarakat Kongo mencerminkan keberhasilan interaksi lintas batas yang bermartabat dalam kerangka hubungan internasional (Setyowati et al., 2018; Dugis, 2016). Sementara itu, keterbatasan ROE dan tekanan psikologis menegaskan bahwa konsep keamanan harus diterapkan pula secara internal terhadap personel. Rekomendasi Sriyanto (2022) mengenai adopsi UNPCRS yang sistematis dan komprehensif menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan regulasi dan kesiapan personel ini. Dengan demikian, keempat dimensi tantangan tersebut tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan saling berkelindan membentuk lingkungan operasional yang menuntut adaptasi cepat dan kapabilitas multidimensi.

Temuan mengenai penerimaan positif masyarakat Kongo terhadap personel Indonesia memiliki makna yang mendalam. Hambatan bahasa Swahili yang semula dipandang sebagai tantangan terbesar justru berubah menjadi jembatan pembangunan kepercayaan ketika personel bersedia mempelajari bahasa lokal secara timbal balik. Fenomena ini mempertegas bahwa keberhasilan interaksi lintas budaya tidak ditentukan oleh penguasaan bahasa yang sempurna, melainkan oleh kesediaan untuk memahami dan menghormati budaya masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan penelitian Pasha dan Yustitiningtyas (2024) yang menunjukkan bahwa kompleksitas dinamika sosial di Republik Demokratik Kongo menuntut pendekatan yang sensitif dan berkelanjutan, serta memperkuat pandangan Dugis (2016)

bahwa komunikasi merupakan unsur esensial dalam hubungan internasional yang efektif. Keberhasilan Kontingen Garuda mengatasi hambatan ini menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis nilai kemanusiaan universal mampu melampaui sekat-sekat perbedaan budaya dan bahasa. Signifikansi temuan pada dimensi regulasi dan psikologis perlu digarisbawahi secara khusus. Keterbatasan ROE menempatkan personel pada dilema antara keharusan melindungi warga sipil dan kewajiban mematuhi prinsip use of force minimal, sebuah ketegangan yang merupakan karakteristik inheren misi peacekeeping modern (Hutabarat, 2018; Anshari, 2007). Namun, kepatuhan terhadap ROE justru memperkuat legitimasi Indonesia sebagai aktor internasional yang bertanggung jawab dalam sistem multilateral PBB dan mencerminkan implementasi politik luar negeri bebas aktif (Dugis, 2016). Adapun keberhasilan meminimalisir tekanan psikologis melalui seleksi ketat dan kepemimpinan yang solid menegaskan bahwa keberhasilan misi perdamaian pada akhirnya bertumpu pada kesejahteraan dan ketangguhan personel itu sendiri, sejalan dengan dimensi keamanan individu dalam kerangka human security UNDP. Secara keseluruhan, pembahasan komparatif terhadap keempat dimensi tantangan menegaskan bahwa kompleksitas misi Kontingen Garuda di Kalemie tidak dapat dipahami secara parsial. Fakta bahwa kontingen tetap mampu menjalankan misinya secara efektif di tengah seluruh tantangan tersebut, sebagaimana dibuktikan oleh keberhasilan stabilisasi Kalemie, menjadi bukti ketangguhan institusional dan komitmen Indonesia dalam mendukung sistem keamanan kolektif di bawah payung PBB. Kemampuan mengelola tantangan multidimensi inilah yang menjadi prasyarat bagi keberhasilan penerapan strategi adaptif-humanis yang akan diuraikan pada subbagian berikutnya.

Strategi Adaptif-Humanis Kontingen Garuda XXXIX-A MONUSCO

Strategi yang diterapkan Kontingen Garuda bersifat terpadu dan adaptif, memadukan pendekatan militer dan sosial secara seimbang. Berdasarkan hasil wawancara, para informan memiliki kesamaan pandangan bahwa efektivitas misi ditentukan oleh kombinasi keamanan preventif, pendekatan berbasis masyarakat, koordinasi lintas sektor, inovasi teknologi, serta evaluasi berkelanjutan. Kelima elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan dirangkai dalam satu kesatuan operasional yang saling menopang, sehingga membentuk empat pilar strategi utama yang dikendalikan melalui mekanisme evaluasi berkala. Keamanan preventif dijalankan melalui patroli intensif dan penguatan Quick Reaction Force (QRF) yang proporsional sesuai ROE, dikombinasikan dengan pendekatan khas Indonesia melalui prinsip "5S" (sapa, senyum, salam, sopan, santun) dalam setiap interaksi lapangan untuk menciptakan efek cegah sekaligus nilai humanis. Community engagement dibangun melalui komunikasi rutin dengan tokoh adat, pemuda, dan perempuan sebagai sistem peringatan dini konflik, diperkuat aksi nyata seperti pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan yang membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, sebagaimana tampak pada Gambar 6. Koordinasi lintas sektor dilakukan bersama UNPOL, UNICEF, dan WHO untuk mencegah tumpang tindih tugas. Inovasi teknologi berupa drone, Sistem Informasi Geografis, dan komunikasi satelit dipadukan dengan komunikasi manual dan pembelajaran bahasa Swahili sebagai adaptasi kontekstual. Seluruh pilar dikendalikan melalui mekanisme evaluasi berkala berupa after-action review (AAR) dan rapat perwira mingguan.



Gambar 6. Pasukan Garuda Memberikan Dukungan Kesehatan Gratis kepada Masyarakat di Kalemie, Provinsi Tanganyika

Sumber: Dokumentasi Satgas TNI Konga XXXIX-A/MONUSCO (2018)

Prinsip "5S" yang menjadi ciri khas strategi Indonesia dinilai para informan sebagai instrumen yang jitu untuk merangkul warga sipil kapan pun dan di mana pun. Dalam setiap interaksi dengan masyarakat, peran militer sengaja tidak ditonjolkan dan kegiatan dengan warga sipil dilakukan tanpa menonjolkan persenjataan agar masyarakat tidak merasa takut. Strategi ini dipadukan dengan sinergi antara hard power dan soft power dalam kerangka diplomasi pertahanan, di mana kehadiran militer menciptakan ruang aman bagi proses diplomasi, sedangkan diplomasi memastikan tindakan militer tetap selaras dengan mandat politik dan tujuan perdamaian. Dengan demikian, keamanan dan dialog berjalan beriringan sebagai dua sisi dari satu strategi yang utuh. Pada pilar community engagement, komunikasi rutin dengan tokoh adat, pemuda, dan perempuan difungsikan sebagai early warning system yang memungkinkan deteksi dini potensi konflik sebelum tereskalasi. Para informan sepakat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan kunci pencegahan konflik, sehingga membangun kedekatan emosional melalui pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan menjadi sarana strategis. Pada pilar koordinasi lintas sektor, kerja sama dijalin tidak hanya dengan komponen sipil MONUSCO dan UNPOL, tetapi juga dengan organisasi internasional seperti UNICEF dan WHO, serta melalui kunjungan pejabat PBB seperti Force Commander dan Special Representative of the Secretary-General (SRSG) sebagai mekanisme koordinasi formal yang mencegah tumpang tindih tugas. Adapun pada pilar inovasi dan adaptasi teknologi, pemanfaatan drone, Sistem Informasi Geografis, media sosial, komunikasi satelit, dan aplikasi mobile ditujukan untuk meningkatkan responsivitas dan situational awareness misi. Namun, para informan memberikan catatan penting bahwa komunikasi langsung dan manual tetap diprioritaskan mengingat keterbatasan teknologi di masyarakat lokal, sehingga pembelajaran bahasa Swahili justru menjadi inovasi sosial yang tidak kalah strategis. Seluruh pilar tersebut dievaluasi secara berkala melalui after-action review setelah operasi penting serta rapat perwira mingguan atau bulanan, yang hasilnya dijadikan pedoman fleksibel untuk penyesuaian strategi sesuai dinamika konflik yang terus berubah di lapangan.

Tabel 4. Pemetaan Strategi Kontingen Garuda dalam Kerangka Means-Ways-Ends (Lykke, 1989)

No	Pilar Strategi	Temuan Lapangan	Pemetaan Teoretis
1	Keamanan preventif	Patroli intensif dan QRF proporsional sesuai ROE, dikombinasikan prinsip "5S"	Komponen ways: metode militer yang diperluas dengan dimensi sosial-budaya (Glueck dalam Amirullah, 2015)
2	Community engagement	Komunikasi rutin dengan tokoh adat, pemuda, dan perempuan sebagai early warning system	Komponen means dan ways: jaringan komunitas sebagai sumber daya sosial dan informasi (Stanton)

3	Koordinasi lintas sektor	Kerja sama aktif dengan UNPOL, UNICEF, dan WHO	Perluasan means mencakup ekosistem aktor PBB; strategi komprehensif (Buku Putih Pertahanan dalam Chaer et al., 2021)
4	Inovasi dan adaptasi teknologi	Drone dan SIG dipadukan komunikasi manual serta pembelajaran bahasa Swahili	Keseimbangan means (teknologi) dan ways (adaptasi kontekstual) berorientasi ends (David, 2011 dalam Hartanto et al., 2021)
5	Evaluasi berkala (AAR)	After-action review dan rapat perwira mingguan sebagai penyesuaian strategi	Menjaga keselarasan berkelanjutan means-ways-ends sebagai manajemen risiko strategis

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Keempat pilar strategi tersebut dapat dipetakan secara sistematis dalam kerangka means-ways-ends Lykke (1989), membuktikan bahwa pelaksanaan misi dilandasi perencanaan strategis yang matang, bukan sekadar respons ad hoc. Analisis komparatif terhadap masing-masing pilar menunjukkan bahwa keunggulan strategi Kontingen Garuda tidak terletak pada satu elemen tunggal, melainkan pada keterpaduan seluruh elemen yang saling memperkuat. Pembahasan berikut menguraikan setiap pilar secara mendalam dengan membandingkannya terhadap temuan penelitian terdahulu dan menempatkannya dalam kerangka teori strategi yang digunakan. Temuan ini memperkaya kajian terdahulu dengan nuansa penting. Keberhasilan community engagement sebagai sistem peringatan dini mempertegas efektivitas pendekatan non-kekerasan yang ditemukan Savero et al. (2024), sementara soliditas koordinasi lintas sektor justru mengisi celah kelemahan koordinasi antarlembaga yang diidentifikasi Pasha dan Yustitiningtyas (2024) dalam perlindungan hak anak di RDK. Terkait teknologi, temuan lapangan memberikan koreksi kontekstual atas rekomendasi Nasution et al. (2024): adaptasi terhadap keterbatasan lokal, termasuk keputusan memprioritaskan komunikasi manual, sama pentingnya dengan adopsi teknologi canggih. Adapun mekanisme AAR dan rapat perwira mingguan berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko strategis yang menjaga keselarasan means-ways-ends sepanjang penugasan, mencerminkan budaya learning organization yang adaptif.

Dengan demikian, kontribusi orisinal penelitian ini adalah perumusan model strategi adaptif-humanis khas Indonesia yang mengintegrasikan kekuatan militer, kecerdasan sosial, dan sinergi kelembagaan dalam satu kesatuan koheren. Sintesis antara prinsip-prinsip militer dan nilai-nilai humanis melalui prinsip "5S" serta pembelajaran organisasional melalui after-action review tidak hanya relevan secara operasional, tetapi juga memperkuat legitimasi dan penerimaan misi di mata masyarakat lokal. Model ini memperkaya studi pemeliharaan perdamaian berbasis pendekatan sipil-militer terpadu bagi negara berkembang, sekaligus menegaskan konsistensi kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia yang menempatkan perdamaian dunia sebagai kepentingan nasional strategis (Sanjoko, 2025). Tujuan akhir (ends) berupa stabilitas wilayah dan perlindungan sipil dicapai melalui metode (ways) beragam yang adaptif, didukung sumber daya (means) yang tidak hanya militer tetapi juga modal sosial berupa kepercayaan masyarakat, jaringan koordinasi antarinstansi, dan kompetensi kultural personel. Pendekatan "5S" memperlihatkan bahwa ways paling efektif dalam misi perdamaian adalah yang memadukan ketegasan militer dengan ketulusan kemanusiaan, sebuah respons cerdas terhadap karakteristik konflik komunal di Kalemie yang tidak dapat diselesaikan semata melalui pendekatan koersif.

Analisis lebih mendalam terhadap pilar keamanan preventif menunjukkan bahwa kombinasi Quick Reaction Force dengan prinsip "5S" merupakan bentuk konkret dari komponen ways yang tidak semata bersifat taktis-militer. Patroli intensif dan kehadiran fisik di titik-titik strategis menciptakan efek cegah (deterrence) yang sistematis, sementara prinsip "5S" memperluas dimensi ways tersebut menuju pendekatan yang merangkul nilai-nilai sosial

dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Glueck dalam Amirullah (2015) bahwa strategi efektif adalah rencana luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan dengan tantangan lingkungan. Dalam konteks konflik komunal Kalemie, pendekatan "5S" merupakan respons cerdas yang mengubah interaksi keamanan menjadi sarana membangun kepercayaan, bukan sekadar penegakan kehadiran militer. Adapun pada pilar community engagement, pengoptimalan tokoh adat, pemuda, dan perempuan sebagai sistem peringatan dini memperluas jangkauan komponen means melampaui kapasitas militer konvensional. Jaringan komunitas yang dirangkul menjadi sumber daya berupa informasi dan kepercayaan yang tidak dapat diperoleh melalui cara-cara militer semata, sejalan dengan pandangan Stanton bahwa strategi menempatkan masyarakat lokal sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek perlindungan. Pemetaan seluruh pilar strategi ke dalam kerangka means-ways-ends membuktikan bahwa keberhasilan Kontingen Garuda bukan hasil dari improvisasi ad hoc, melainkan buah dari perencanaan strategis matang yang menjaga keselarasan berkelanjutan antara tujuan, metode, dan sumber daya sepanjang masa penugasan.

Pilar koordinasi lintas sektor turut memperlihatkan kedalaman strategis yang khas. Kemampuan Kontingen Garuda menjalin kerja sama dengan UNPOL, UNICEF, dan WHO merepresentasikan perluasan komponen means, di mana sumber daya yang dimanfaatkan tidak terbatas pada kekuatan organik satuan, melainkan mencakup seluruh ekosistem aktor PBB dan organisasi internasional yang hadir di wilayah misi. Hal ini selaras dengan pandangan Buku Putih Pertahanan (Chaer et al., 2021) bahwa strategi komprehensif melibatkan seluruh elemen kekuatan, bukan hanya elemen militer. Keberhasilan koordinasi ini sekaligus mengisi celah kelemahan yang teridentifikasi dalam penelitian Pasha dan Yustitiningtyas (2024), yang menemukan bahwa absennya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan utama perlindungan hak anak di Republik Demokratik Kongo. Dengan demikian, praktik koordinasi Kontingen Garuda dapat dijadikan model bagi penguatan sinergi antaraktor dalam misi perdamaian serupa. Pilar inovasi dan adaptasi teknologi memberikan pelajaran strategis yang tidak kalah penting. Penggunaan drone dan Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan wilayah menunjukkan bahwa kontingen telah mengadopsi teknologi modern sesuai rekomendasi Nasution et al. (2024) dan Sriyanto (2022). Namun, keputusan untuk tetap memprioritaskan komunikasi manual dan pembelajaran bahasa Swahili ketika kondisi lapangan menuntutnya merupakan ekspresi kecerdasan strategis yang adaptif, bukan sekadar penggunaan alat secara mekanis. Temuan ini memberikan nuansa penting bahwa adaptasi kontekstual terhadap keterbatasan teknologi masyarakat lokal sama pentingnya dengan adopsi teknologi canggih, sejalan dengan pandangan David (2011) dalam Hartanto et al. (2021) bahwa strategi merupakan alat kolektif yang harus terus disesuaikan dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

Terakhir, mekanisme evaluasi berkala melalui after-action review dan rapat perwira mingguan memiliki makna strategis yang melampaui rutinitas administratif. Dalam perspektif teori strategi Lykke (1989), mekanisme ini memastikan keselarasan berkelanjutan antara means, ways, dan ends, sebuah keselarasan yang apabila terganggu akan menimbulkan strategic risk. Dengan kata lain, after-action review berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko strategis yang menjamin seluruh sumber daya dan metode yang digunakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan akhir misi. Praktik ini mencerminkan budaya learning organization yang adaptif dan berorientasi pembelajaran, menjadikan strategi Kontingen Garuda bukan dokumen perencanaan statis, melainkan proses dinamis yang terus disempurnakan berdasarkan realitas lapangan. Inilah yang menjadikan strategi tersebut tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan sepanjang masa penugasan. Pemetaan seluruh pilar strategi ke dalam kerangka means-ways-ends memperlihatkan

koherensi internal yang jarang ditemukan pada operasi perdamaian yang bersifat reaktif. Tujuan akhir berupa stabilitas wilayah dan perlindungan warga sipil (ends) dicapai melalui perpaduan metode adaptif (ways) yang mencakup keamanan preventif, community engagement, koordinasi lintas sektor, dan inovasi teknologi, dengan dukungan sumber daya (means) yang memadukan kapabilitas militer, modal sosial, jaringan antarinstansi, dan kompetensi kultural personel. Koherensi inilah yang membedakan pendekatan Kontingen Garuda dari model peacekeeping yang mengandalkan superioritas kekuatan semata, dan menegaskan bahwa keberhasilan misi di Kalemie merupakan hasil dari perencanaan strategis yang matang, bukan sekadar keberuntungan situasional di lapangan. Secara keseluruhan, pembahasan komparatif terhadap keempat pilar strategi menunjukkan bahwa strategi Kontingen Garuda di Kalemie merupakan model operasi perdamaian yang menggabungkan kekuatan militer, kecerdasan sosial, dan sinergi kelembagaan dalam satu kesatuan yang koheren. Keunggulan komparatif kontingen terletak pada kemampuannya mengintegrasikan prinsip-prinsip militer dengan nilai-nilai humanis khas Indonesia, sebuah sintesis yang tidak hanya relevan secara operasional tetapi juga memperkuat legitimasi dan penerimaan misi di mata masyarakat lokal. Temuan ini memperkuat argumentasi Sanjoko (2025) bahwa keterlibatan aktif Indonesia dalam misi perdamaian PBB merupakan cerminan konsisten dari kebijakan luar negeri bebas aktif yang menjadikan perdamaian dunia sebagai kepentingan nasional strategis dan bernilai jangka panjang.

Model Strategi Adaptif-Humanis: Sebuah Sintesis

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap ketiga fokus penelitian, dapat dirumuskan sebuah model strategi adaptif-humanis yang menjadi kontribusi orisinal penelitian ini. Model tersebut bertumpu pada tiga pilar yang saling menopang. Pertama, keterpaduan sipil-militer, yaitu kemampuan memadukan fungsi keamanan dengan fungsi pembangunan dan kemanusiaan dalam satu kesatuan operasional yang koheren, sebagaimana tercermin dari integrasi patroli keamanan dengan program CIMIC dan civic mission. Kedua, orientasi humanis-persuasif yang terkristalisasi dalam prinsip "5S", yang menempatkan pembangunan kepercayaan masyarakat sebagai pusat gravitasi strategi, bukan sekadar pelengkap operasi militer. Ketiga, pembelajaran berkelanjutan melalui mekanisme after-action review dan rapat perwira mingguan yang menjadikan strategi bersifat dinamis dan senantiasa selaras dengan perubahan dinamika konflik. Kegiatan penyuluhan keamanan dan dukungan kesehatan gratis kepada masyarakat, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 7, merupakan wujud konkret dari keterpaduan ketiga pilar tersebut. Dalam satu kegiatan, unsur keamanan, pemberdayaan, dan pembangunan kepercayaan berlangsung secara simultan. Inilah yang membedakan model Kontingen Garuda dari pendekatan peacekeeping konvensional yang cenderung memisahkan fungsi militer dari fungsi sipil. Model adaptif-humanis ini tidak hanya berhasil menstabilkan Kalemie dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan melalui pemberdayaan kapasitas lokal.



Gambar 7. Pasukan Garuda Memberikan Penyuluhan Keamanan kepada Masyarakat di Kalemie, Provinsi Tanganyika

Sumber: Dokumentasi Satgas TNI Konga XXXIX-A/MONUSCO (2018)

Secara akademik, temuan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas operasi pemeliharaan perdamaian pada konflik multidimensi tidak dapat diukur semata dari kapabilitas militer, melainkan dari kemampuan mengintegrasikan means, ways, dan ends secara adaptif dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya setempat. Model ini menawarkan alternatif bagi negara-negara berkembang penyumbang pasukan (troop-contributing countries) yang kerap menghadapi keterbatasan sumber daya, dengan menunjukkan bahwa modal sosial dan kecerdasan kultural dapat menjadi pengganda kekuatan (force multiplier) yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi memperkaya khazanah studi strategi pertahanan sekaligus memberikan rujukan praktis bagi penyiapan misi pemeliharaan perdamaian Indonesia di masa mendatang. Pada akhirnya, keberhasilan Kontingen Garuda XXXIX-A di Kalemie tidak hanya berhasil dalam konteks penugasan spesifik, tetapi juga memberikan model referensi yang berharga bagi pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian Indonesia di masa mendatang. Model strategi adaptif-humanis yang dirumuskan dalam penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan sesungguhnya dari sebuah kontingen perdamaian terletak pada kemampuannya menyeimbangkan ketegasan dengan ketulusan, kapabilitas militer dengan kecerdasan sosial, serta ketaatan pada mandat internasional dengan sensitivitas terhadap konteks lokal. Sintesis inilah yang menjadikan pendekatan Indonesia relevan tidak hanya secara operasional, tetapi juga sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan doktrin pemeliharaan perdamaian PBB yang lebih humanis dan berkelanjutan. Implikasi model ini bagi negara-negara berkembang penyumbang pasukan sangat signifikan. Di tengah keterbatasan anggaran, teknologi, dan persenjataan yang kerap menjadi kendala, model adaptif-humanis menawarkan jalan alternatif yang menekankan pada optimalisasi modal sosial, kecerdasan kultural, dan pendekatan berbasis kepercayaan sebagai pengganda kekuatan. Pendekatan ini membuktikan bahwa efektivitas misi perdamaian tidak semata ditentukan oleh superioritas material, tetapi juga oleh kualitas hubungan yang dibangun dengan masyarakat yang dilindungi. Dengan demikian, pengalaman Kontingen Garuda dapat menjadi rujukan strategis bagi perumusan doktrin dan kebijakan pemeliharaan perdamaian yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas keamanan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan perdamaian yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi masyarakat pascakonflik.

Implikasi Teoretis dan Praktis Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa keberhasilan operasi pemeliharaan perdamaian tidak semata ditentukan oleh kekuatan militer,

tetapi juga oleh kemampuan pasukan mengintegrasikan aspek keamanan, hubungan sipil-militer, diplomasi lapangan, serta adaptasi terhadap karakteristik sosial-budaya wilayah operasi. Integrasi antara teori keamanan multidimensi Buzan dan teori strategi means-ways-ends Lykke yang diterapkan dalam penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan model konseptual yang lebih komprehensif dalam menjelaskan keterkaitan antara sumber daya, metode pelaksanaan, dan tujuan strategis pada operasi pemeliharaan perdamaian modern. Pendekatan ini memperkaya kajian strategi pertahanan dengan menempatkan dimensi humanis dan kultural sebagai komponen strategis yang setara dengan kapabilitas militer. Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi bagi sejumlah pemangku kepentingan. Bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan peningkatan kontribusi Indonesia pada operasi pemeliharaan perdamaian dunia, mencakup modernisasi peralatan, penguatan interoperabilitas dengan kontingen multinasional, serta pengembangan diplomasi pertahanan. Bagi Markas Besar TNI dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, hasil penelitian dapat menjadi dasar penyempurnaan doktrin, kurikulum pelatihan, dan pembinaan personel, khususnya dalam memperkuat kemampuan komunikasi lintas budaya, negosiasi, cultural intelligence, penguasaan Rules of Engagement, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung situational awareness. Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam pelaksanaan misi MONUSCO, model strategi adaptif-humanis yang dirumuskan dapat menjadi masukan bagi pengembangan pedoman operasi yang lebih responsif terhadap karakteristik konflik multidimensi, dengan memperkuat sinergi antara operasi keamanan, pendekatan kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Adapun bagi kalangan akademik, khususnya di bidang strategi pertahanan dan hubungan internasional, penelitian ini memperkaya kajian mengenai strategi operasi pemeliharaan perdamaian, keamanan multidimensi, dan diplomasi pertahanan, sekaligus menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model strategi yang relevan dengan tantangan keamanan kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kontingen Garuda XXXIX-A MONUSCO di Kalemie bersifat multidimensional, mencakup stabilisasi keamanan, pembangunan infrastruktur, rekonsiliasi sosial, dan koordinasi lintas sektoral, menjadikannya bukan sekadar penjaga ketertiban melainkan fasilitator perdamaian yang berorientasi humanis. Tantangan yang dihadapi juga bersifat multidimensional, meliputi ancaman kelompok bersenjata, kendala geografis dan infrastruktur, hambatan sosial-budaya dan bahasa, serta batasan ROE dan tekanan psikologis personel, yang seluruhnya dapat dikelola melalui adaptasi strategi, seleksi personel ketat, dan dukungan unsur PBB. Strategi yang diterapkan bersifat terpadu dan adaptif, memadukan keamanan preventif, community engagement, koordinasi lintas sektor, dan inovasi teknologi, dengan prinsip "5S" dan after-action review sebagai penanda kebaruan yang menjadikannya efektif sekaligus berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi mengintegrasikan teori keamanan multidimensi Buzan dengan teori strategi means-ways-ends Lykke dalam menjelaskan operasi pemeliharaan perdamaian negara berkembang, sekaligus memperkaya kajian mengenai efektivitas strategi yang tidak hanya diukur dari stabilitas keamanan, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat lokal dan efektivitas kerja sama sipil-militer. Secara praktis, temuan ini bermanfaat bagi Kementerian Pertahanan dalam penyusunan kebijakan modernisasi peralatan, penguatan interoperabilitas, dan dukungan logistik; bagi Mabes TNI dan PMPP TNI dalam penyempurnaan doktrin, kurikulum pelatihan lintas budaya, negosiasi, penguasaan ROE, serta pemanfaatan teknologi informasi; serta bagi

PBB dalam pengembangan pedoman operasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik konflik multidimensi. Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah informan yang terbatas pada satu kontingen dan sifat retrospektif data, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan comparative peacekeeping studies antarmisi seperti MONUSCO, UNIFIL, MINUSCA, dan UNMISS untuk memperoleh model konseptual yang lebih universal. Penelitian mendatang juga perlu merumuskan indikator efektivitas strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya mengukur stabilitas keamanan, tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat lokal, keberhasilan perlindungan warga sipil, efektivitas Civil-Military Cooperation, serta keberlanjutan stabilitas pascakonflik, sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan strategi pemeliharaan perdamaian yang lebih adaptif dan relevan terhadap dinamika konflik kontemporer. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia, para dosen pembimbing, serta seluruh personel Satgas TNI Konga XXXIX-A/MONUSCO yang telah bersedia menjadi informan dan mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. (2015). Manajemen strategi: Teori, konsep, dan kinerja. Mitra Wacana Media.
- Anshari, N. (2007). Pergeseran konsep peacekeeping: Operasi PBB dalam sengketa bersenjata di Irak, Somalia dan bekas negara Yugoslavia. *Jurnal Hukum Humaniter*, 3(4), 844–875.
- Bundu, P. A. (2023). Jejak kiprah MONUSCO dalam merajut perdamaian di Kongo 2020-2021. *Jurnal Transformasi Global*, 10(2).
- Buzan, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era* (2nd ed.). Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Chaer, M. I., Sumarlan, S., & Widodo, P. (2021). Strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama Trilateral Cooperative Arrangement (Port Visit Indomalphi 2017-2019). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(3), 75–91. <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i3.787>
- Dugis, V. (2016). *Teori hubungan internasional: Perspektif-perspektif klasik*. Cakra Studi Global Strategis.
- Gulo, S. J., Seba, R. O. C., & Fretes, C. H. J. De. (2024). Peran negara dan MONUSCO dalam pemenuhan keamanan personal masyarakat Republik Demokratik Kongo tahun 2021-2022. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 11623–11634. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6012>
- Hartanto, D. R., Widodo, Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Supriyadi. (2021). Analisis teori strategi terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Education and Development Institut*, 9(1), 87–90.
- Hutabarat, L. F. (2018). Diplomasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(2), 75–96. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i2.308>
- Lykke, A. F. (1989). *Defining military strategy: Ends, ways, means*. U.S. Army War College.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Monica, D. A. A., & Suarnata, P. A. (2023). Peran organisasi internasional dalam pemeliharaan perdamaian. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 41–49.
- Nasution, M. F., Adriyanto, A., & Simanjuntak, H. D. A. (2024). Pendekatan strategis dan operasional Kontingen Garuda XXXIX-D MONUSCO dalam menjaga perdamaian dunia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 742–758. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2353>

- Pasha, A. A. K., & Yustitianingtyas, L. (2024). Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam memberikan perlindungan hak anak sebagai korban perekrutan tentara bersenjata di Republik Demokratik Kongo. *Wajah Hukum*, 8(1), 120. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1409>
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2017). *Pengantar ilmu hubungan internasional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Priastanto, Y., Subagyo, A., & Sulaiman, Y. (2024). Operasi perdamaian Kompi Zeni Kontingen Garuda dalam resolusi konflik di Republik Demokratik Kongo (Studi kasus pembangunan wilayah Provinsi Beni). *Diplomacy and Global Security Journal*, 1(1), 273–284. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2858>
- Samad, M. Y., & Permatasari, D. A. (2022). Analisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina. *Jurnal Cendekia Waskita*, 6(1), 36–46.
- Sanjoko, R. (2025). Kebijakan luar negeri Indonesia terkait misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Diplomacy and Global Security Journal*, 2(2), 411–424. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4623>
- Savero, V., Swastanto, Y., & Timur, F. G. C. (2024). Implementasi program Disarmament, Demobilization and Reintegration oleh satuan tugas MONUSCO di Kongo tahun 2015-2018. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 625–634.
- Sd, H. A., & Toy, B. A. (2018). Efektivitas peacekeeping oleh United Nations-African Union Hybrid Operation Mission in Darfur (UNAMID) pada konflik di Sudan tahun 2007-2010. *Andalas Journal of International Studies*, 7(1), 45–60.
- Setyowati, R. N., Kartikasari, M. M., & Habibah, S. M. (2018). *Hubungan internasional dan politik global*. Unesa University Press.
- Sriyanto, S. (2022). Kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia di Republik Demokratik Kongo. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1), 93–131. <https://doi.org/10.33172/jdp.v8i1.889>
- Tanjung, W. A. (2020). Garda perdamaian dunia: Peranan Kontingen Garuda II sebagai pasukan perdamaian di Republik Kongo (1960-1961). *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 9(2), 147–160. <https://doi.org/10.17509/factum.v9i2.25588>
- TNI. (2019). Laporan purna tugas serah terima Satgas RDB TNI Konga XXXIX-A/MONUSCO TA. 2019: Lampiran A, Sub Lampiran 2 (Bidang Intelijen). Tentara Nasional Indonesia.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press.
- Yunanda, W. W., Nulhakim, F., & Soraya, N. A. (2022). Strategi menjaga kedaulatan bangsa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di era Society 5.0 dalam perspektif ilmu pertahanan dan bela negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1195–1202.